

Political Sentiment Analysis: Sebuah Studi terhadap Framming dan Sentimen Wacana “Jokowi Tiga Periode” melalui Pemberitaan Online dan Twitter

Saktio Bagaskoro¹, Imron Amrozi², Amir Rizqi Ramadhan³

Diserahkan: 13 Desember 2021 | **Diterima:** 24 Oktober 2022 |

Diterbitkan: 30 Desember 2022

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi isu kewacanaan elektoral seputar “Jokowi Tiga Periode” yang muncul dan berkembang di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi framing media daring dan analisis sentimen media sosial Twitter terhadap kewacanaan tersebut. Kewacanaan “Jokowi Tiga Periode” ini cukup menarik untuk dielaborasi dan dikerangkai dari perspektif politik karena menekankan unsur personalisasi tokoh sebagai inti wacana. Penelitian menggunakan dua dataset yakni data media online dan data media sosial Twitter dalam kurun waktu yang sama, yakni 1 Maret-31 Juni 2021. Metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu text network analysis, social network analysis, dan natural language processing. Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa fenomena dorongan perubahan masa jabatan presiden bukan hal baru. Terlebih, analisis terhadap media daring menunjukkan tingginya exposure pemberitaan terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode”. Temuan juga menunjukkan adanya pembagian pemberitaan menjadi empat kluster polarisasi. Dari sisi analisis sentimen, dorongan perubahan masa jabatan presiden melalui wacana “Jokowi Tiga

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Email: saktiobagaskoro@mail.ugm.ac.id

2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

3 Departemen Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada.

Periode” banyak dinilai oleh pengguna Twitter sebagai hal yang negatif. Ini dibuktikan dengan dominasi sentimen negatif sebanyak 56% dengan mayoritas mengaitkan isu ini dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

Kata kunci: masa jabatan; inkonstitusional; framing media; sentimen

PENDAHULUAN

Dalam pembahasan politik hukum, konstitusi lebih sering dinarasikan sebagai pedoman dasar dan utama yang mengatur cara kerja institusi-institusi negara dan membatasi area juga masa kerja institusi tersebut. Misalnya, konstitusi mengatur tentang pembatasan kekuasaan terkait masa jabatan presiden selama dua periode dengan waktu 10 tahun (*presidential term limit*). Sebaliknya, relasi institusi-institusi negara dengan konstitusi sering tidak dilihat sebagai hal yang penting dalam kehidupan demokrasi normatif. Amandemen konstitusi 1999–2002 mengingatkan kembali bagaimana pemilik kekuasaan dalam institusi-institusi negara juga mampu mengatur konstitusi tersebut untuk kepentingan tertentu. Politik hukum berupa amandemen tersebut merupakan proses hilir dari berbagai wacana, terutama menginginkan pembatasan kekuasaan eksekutif ditetapkan dalam rumusan yang jelas sehingga dapat menghindari

penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, wacana memiliki peran mengonstruksi bagaimana kondisi ideal diimajinasikan dan diklaim sebagai poin yang harus diciptakan melalui saluran-saluran institusi terkait.

Wacana tentang upaya mengatur kembali konstitusi tersebut muncul melalui perdebatan *presidential term limit* dalam praktik dorongan “Jokowi Tiga Periode” yang digagas oleh Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro). Pada tanggal 19 Juni 2021 sejumlah orang yang menamakan diri sebagai relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) mendeklarasikan Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2023 (Seknas Jokpro 2024) di Jakarta (Kompas, 2021). Gerakan ini ditujukan untuk mendorong Joko Widodo dan Prabowo Subianto agar maju pada Pemilihan Presiden 2024. Oleh Muhammad Qodari (Direktur Eksekutif Indo Barometer) yang juga mendukung wacana ini, deklarasi Jokowi-Prabowo 2024 dibuat dengan maksud untuk mengurangi tensi politik terutama polarisasi pada Pemilu 2024 (Delvira, 2021). Gagasan ini juga dapat diartikan mendorong Jokowi untuk menjabat dalam periode ketiga sehingga menjadi sebab munculnya tagline “Jokowi Tiga Periode”. Gagasan Jokowi-Prabowo 2024 yang terus dibangun oleh Komunitas Jokpro pada

kenyataannya justru memunculkan sorotan kuat pada sosok Joko Widodo. Dorongan Jokowi untuk menjadi presiden kembali pada periode ketiga menjadi konstruksi utama yang dilihat oleh publik.

Selanjutnya, wacana tentang “Jokowi Tiga Periode” diperdebatkan antara dua polarisasi konstruksi wacana dengan kerangka *presidential term limit*, yaitu konstitusi merupakan dasar dan pedoman hukum yang harus dijaga dan konstitusi sebagai produk politik hukum yang dapat diubah (amandemen) untuk kepentingan dan kemaslahatan publik. Menurut Maarten Halff (dalam Kofi Annan Foundation, 2016), kerangka perdebatan *term limits* atau pembatasan masa jabatan membahas seputar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum (konstitusi negara) tentang ketentuan masa jabatan pemegang jabatan publik. Namun demikian, terdapat kecenderungan upaya atau inisiatif mengubah dan menghindari pembatasan masa jabatan tersebut (Kofi Annan Foundation, 2016).

Relawan dan komunitas Jokpro merupakan aktor yang melakukan konstruksi bahwa konstitusi dapat diubah untuk kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Qodari (Ketua Jokpro), “Jokowi Tiga Periode” perlu didorong menjadi kenyataan karena Joko Widodo memiliki kinerja yang bagus dalam pembangunan

dengan catatan perlu amandemen Undang-Undang dasar 1945 (Delvira, 2021). Hal seperti ini senada dengan yang diungkapkan oleh Versteeg *et.al.* (2020) bahwa beberapa strategi inkonstitusional untuk mengintervensi *term limit*, antara lain penyesuaian dan perubahan konstitusi, penggunaan pengadilan untuk meninjau kembali konstitusi, penunjukan penerus kekuasaan, dan penundaan pemilu. Komunitas Jokpro sengaja melempar wacana “Jokowi Tiga Periode” kepada publik melalui berbagai media massa dengan menjustifikasi kepemimpinan Joko Widodo sebagai periode pemerintahan yang mampu membangun negeri dan memberikan dampak yang signifikan. Wacana tersebut diharapkan mampu menciptakan gelembung suara besar dan dapat digunakan sebagai dasar perubahan konstitusi. Mengingat juga penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sebenarnya relevan melalui contoh beberapa negara yang menerapkan masa jabatan presiden tiga periode, seperti Vietnam, Iran, dan Kongo. Hal tersebut sejatinya menggambarkan sifat media massa sebagai *marketplace of idea* (sebagai pasar ide), yaitu media membantu untuk mendiseminasikan informasi kepada publik dan membuatnya menjadi tawaran yang diperhitungkan (Exoo, 2010).

Sementara itu, konstruksi wacana yang menempatkan konstitusi sebagai dasar dari segala hukum dan patut dijaga serta dilaksanakan untuk dibentuk oleh aktor-aktor yang bertentangan dengan wacana “Jokowi Tiga Periode”. Sebagaimana Ginsburg, Elkins, & Melton (2011), aktor yang menentang “Jokowi Tiga Periode” menekankan pada urgensi utama adanya pembatasan masa jabatan dirancang untuk mencegah tirani dan upaya kekuasaan eksekutif untuk terus menduduki jabatan publik. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian masa jabatan, restrukturisasi kekuasaan, regulasi desain pemilu, dan persoalan insentif pensiun (Ginsburg, Elkins, & Melton, 2011). Dalam hal pemilu, Patta (2009) menambahkan bahwa pemilu didesain sebagai arena *monitoring*, kontrol, dan pengawasan terhadap pejabat publik, sekaligus menciptakan kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam hal pemilihan presiden, hal tersebut sebagaimana dicatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Berdasarkan hal tersebut, wacana “Jokowi Tiga Periode” dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi (inkonstitusional) soal masa jabatan seorang presiden.

Sebagaimana paparan tersebut, kajian ini ditujukan untuk memahami beroperasinya kekuasaan melalui *framing* dan sentimen terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode” menggunakan *big data analysis*. Kajian ini memberikan kontribusi keilmuan baru tentang bagaimana kekuasaan dalam bentuk wacana mengatur dan berupaya memodifikasi konstitusi serta bagaimana respons publik (warganet) dalam mempertahankan konstitusi tersebut. Kajian ini menggunakan metode algoritma *software* dengan analisis politik, berbeda kajian tentang isu seputar wacana dalam politik elektoral lebih didominasi dengan analisis fenomenologi deskriptif dan analisis parsial media massa tertentu. Misalnya dalam jurnal berjudul “Komunikasi Politik Gerakan #2019 Ganti Presiden” yang ditulis oleh Sujoko (2019) menjelaskan bagaimana tagar #2019GantiPresiden menjadi gerakan organik yang luas akibat dukungan elite partai, perkembangan jaringan teknologi yang pesat, jaringan kepartaian, memanfaatkan popularitas artis, dan liberalisasi politik (Sujoko, 2019). Contoh lainnya, tulisan dari Habibi (2019) yang berjudul “Framming Kompas.com dan Republika.co.id atas Pernyataan Ahok tentang Diboongi Al-Maidah 51” yang menjelaskan perbedaan narasi yang disebarkan oleh media Kompas dan Republika, dimana Republika lebih menampilkan topik soal penistaan agama oleh Ahok dengan

objek Surat Al-Maidah Ayat 51 secara gamblang, sedangkan Kompas cenderung keluar dari narasi penistaan agama dengan pemberitaan secara lebih halus (Habibi, 2019). Selain itu, secara praktis dapat dijadikan bahan strategi bagi pemerintah untuk merespons wacana ini, serta bagi tokoh-tokoh publik dan politisi untuk mendiskusikan kembali topik ini dengan berbagai kacamata analisis demokrasi.

Secara metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan *big data analysis* secara deskriptif dengan menggunakan dataset media *online* dan *Twitter* sebagai data yang diambil. Dataset yang diambil menggunakan *timeframe* antara 1 Maret - 30 Juni 2021. Rentang waktu ini telah disesuaikan dengan perkembangan wacana “Jokowi Tiga Periode” yang tinggi *timeframe* tersebut. Sedangkan untuk mengumpulkan data, proses *crawling* baik media *online* maupun *Twitter* menggunakan kata kunci “Jokowi Tiga Periode” atau “jokowi 3 periode”. Metode analisis yang digunakan untuk kajian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode analisis data media *online* dan *Twitter*. Analisis data media *online* dilakukan menggunakan *text network analysis* yang ditujukan untuk mengeksplorasi keterkaitan kata yang dibahas dalam wacana “Jokowi Tiga Periode”. Sedangkan untuk dataset *Twitter*, analisis data menggunakan metode *Natural Language Processing* (NLP) berupa IndoNLU (*Indonesian Natural*

Language Understanding) dan *Social Network Analysis* (SNA). Sementara itu, *social network analysis* digunakan untuk menjelaskan jejaring aktor yang terbentuk pada respons netizen *Twitter* dalam wacana “Jokowi Tiga Periode”. Termasuk di dalamnya *key opinion leader* yang membentuk pola kelompok percakapan dengan sentimen tertentu.

KERANGKA KONSEPTUAL: PERDEBATAN TEORITIS SEPUTAR FRAMMING MEDIA SOSIAL

Framming mengacu pada skema berupa upaya menempatkan, mempersepsikan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa-peristiwa dalam pemahaman tertentu. Berdasarkan kajian Goffman (1974), proses *framing* termasuk memilih/menyeleksi, mempertahankan sekaligus mengesampingkan fakta atau aspek realitas tertentu sehingga bagian yang dipilih menjadi aspek lebih menonjol (Goffman, 1974). Sebagai sebuah konsep yang cukup besar dan berpengaruh dalam studi sosial-politik sejak awal kemunculannya, kajian tentang *framing* memiliki ciri ketidakjelasan teoritis dan empiris. Hal ini sebagian

disebabkan kurangnya model teoritis bersama yang mendasari kajian tentang *framing*. Masalah konseptual ini dapat berpengaruh terhadap operasionalisasi dan konseptualisasi dalam penelitian seputar *framing*.

Konseptualisasi studi seputar *framing* yang tidak jelas ini menjadikan pendekatan yang ada dapat dinilai serupa tetapi berbeda. Terdapat perbedaan yang jelas karena tetap dapat dikategorisasikan berdasarkan warna dan corak bahasanya. Pertama, kajian seputar *framing* yang membahas nilai secara kognitif, konstruksionis, dan kritis (Wicks, 1992; D'Angelo, 2002). Warna pembahasan ini memiliki kecenderungan melihat keragaman paradigmatik juga mengarah pada pandangan komprehensif tentang proses *framing*. Selanjutnya, ada kajian seputar *framing* yang mengaitkannya ke dalam studi ilmu politik, sosiologi, dan studi media (Hertog & McLeod, 2001). Kajian ini menjadikan *framing* sebagai salah satu pendekatan konseptual dalam melihat fenomena sosial-politik dan media. Terakhir, merupakan kajian *framing* yang membahas komparasi konseptual yang menunjukkan perbedaan terminologis antara konsep-konsep (Lodge & Hamill, 1986) ataupun analisis inkonsistensi dan diferensiasi penggunaan konsep *framing* sebagai suatu konsep teoritis (Kinsey & Popkin, 1991; Dearing, 1998).

Dalam level yang lebih implementatif, konsep *framing* melihat sebuah isu atau peristiwa khususnya, tidak terjadi begitu saja dalam ruang hampa. Setidaknya ada empat hal yang memengaruhi fenomena dapat muncul dan berkembang, yakni komunikator, pesan, penerima, dan budaya (Entman, 1993). Fenomena politik dapat muncul dan berkembang secara dinamis dan ditentukan dengan bagaimana fenomena tersebut dikerangka menjadi suatu bagian yang spesifik tampak dan menonjol. Secara spesifik, Entman (1993) menawarkan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana media menyediakan khalayak dengan skema untuk menafsirkan peristiwa. Menurutnya, faktor penting adalah seleksi dan ciri khas, “membangkit adalah memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau rekomendasi perlakuan”.

Dalam kajian politik, kajian Entman (2004) menunjukkan kompleksitas proses produksi bingkai. Dia berpendapat bahwa setidaknya dalam kasus masalah kebijakan luar negeri, bingkai yang berasal dari Negara dapat membentuk bingkai yang digunakan oleh media, parlemen, atau publik. Selanjutnya, reaksi publik terhadap kerangka awal

dapat memengaruhi kerangka revisi pemerintah. Model Entman berargumen bahwa beberapa aktor negara (elite) yang dapat mempengaruhi proses produksi bingkai yang muncul. Di sisi lain, Pan & Kosicki (1993) berpendapat bahwa produksi bingkai tidak selalu merupakan proses yang didorong oleh elite. Warga mengambil bagian dalam *framing* dengan berpartisipasi dalam musyawarah publik. Warga mengembangkan interpretasi mereka sendiri tentang pesan media dan berbicara tentang isu-isu publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Karenanya, perspektif ini memaknai produksi bingkai sebagai “proses multifase yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan” (Pan & Kosicki, 1993).

Framming secara lebih rinci dapat digunakan sebagai konstruksi realitas sosial. Model konstruksi realitas ini memiliki implikasi penting untuk mengonseptualisasikan pembingkai sebagai teori efek media. Analisis peran yang dimainkan khalayak dan media massa dalam pendekatan konstruktivis ini menghasilkan corak kajian yang lebih menonjolkan aspek dampak penggunaan *framing* dalam melihat fenomena kewacanaan. Terlebih lagi, di era perkembangan teknologi yang pesat, semakin pentingnya media sosial telah menciptakan hal baru tantangan bagi banyak pihak untuk memanfaatkannya sebagai sumber

utama pengetahuan. Di satu sisi, kemudahan dan kecepatan distribusi konten yang ditawarkan oleh media sosial dapat berfungsi sebagai medium penting bagi siapapun untuk membuat pesan berupa narasi atau wacana viral dan menjadi perhatian publik (Chu, 2011).

Kemampuan dalam membingkai fenomena menjadi salah satu unit analisis menarik, baru, dan berbeda dalam studi politik kontemporer. Hingga saat ini, kajian politik yang berfokus pada melihat bagaimana bekerjanya *framing* di media sosial mengaitkan pada konsep aktivisme, seperti yang dilakukan Merlyna Lim (2013) dalam kajian yang berjudul “Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia”. Kajian ini menunjukkan pentingnya *framing* dalam kegiatan aktivisme di media sosial, seperti melakukan penyederhanaan narasi, membentuk ikon atau narasi simbolis, dan menunjukkan keberhasilan dalam kasus Prita dan KPK (Lim, 2013). Namun demikian, penggunaan *framing* tidak hanya terbatas pada seputar konsep aktivisme. Kajian ini berusaha mengaplikasikan penggunaan *framing* dalam wacana elektoral. Dengan demikian, menarik untuk melihat bagaimana peran dan analisis *framing* dalam melihat berbagai fenomena sosial politik lainnya, khususnya pada aspek politik elektoral.

WACANA “JOKOWI TIGA PERIODE”: SEBUAH ANALISIS *FRAMMING* MEDIA *ONLINE*

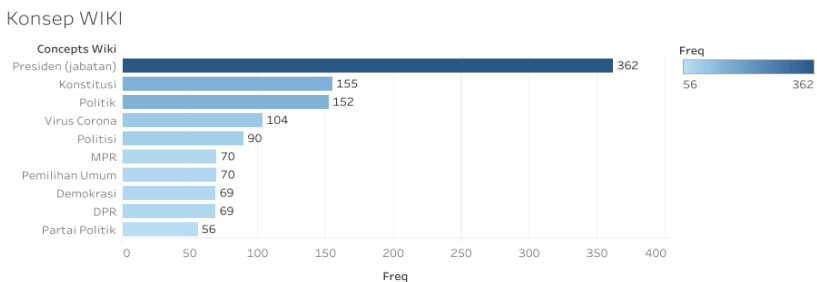
Salah satu andil besar dari muncul dan berkembangnya suatu wacanaan adalah peran media. Saat ini, di era perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin masif, media bukan hanya berperan sebagai wadah informasi semata. Lebih dari itu, peran media juga menyeleksi (memilih atau menghilangkan) seluruh atau sebagian informasi yang dapat disajikan kepada publik. Peran ini juga termasuk mengemas informasi sehingga dapat menunjukkan sesuatu yang lebih menonjol atau juga sebaliknya. Keseluruhan fenomena termasuk politik dapat dikerangkai beragam cara oleh media. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana media memegang peran atas keberhasilan atau kegagalan suatu wacana untuk dapat berkembang dan diterima oleh publik.

Bagian pembahasan ini berfokus untuk menjelaskan *framing* media *online* terhadap wacanaan “Jokowi Tiga Periode” di Indonesia yang dihimpun dari periode 1 Maret–30 Juni 2021. Keseluruhan pembahasan pada bagian ini dapat dikategorikan ke dalam kerangka pembahasan *framing* yang memiliki corak berupaya melihat keragaman

paradigmatik dan pandangan komprehensif melalui penggunaan konsep *framing*. Berdasarkan hasil temuan kajian, terdapat lima aspek yang dapat dijabarkan terkait pemberitaan “Jokowi Tiga Periode” melalui media *online*. Kelima aspek tersebut masing-masing dijelaskan guna memaknai dan menginterpretasi temuan kajian ini.

A. Konsep Paling Banyak Dikaitkan

Grafik 1. Wiki (Konsep Paling Banyak Dibahas)



Wiki merupakan aspek untuk melihat konsep apa saja yang dominan menjadi inti dari pemberitaan media. Dari grafik di atas, menunjukkan 10 konsep teratas yang menjadi fokus pemberitaan media terkait isu “Jokowi Tiga Periode”. Urutan pertama adalah konsep presiden sebagai sebuah jabatan. Hal ini menjadi relevan karena isu “Jokowi Tiga Periode” berkaitan erat dengan konsep jabatan presiden. Hasil analisis menunjukkan konsep “presiden” sebagai konsep politik yang

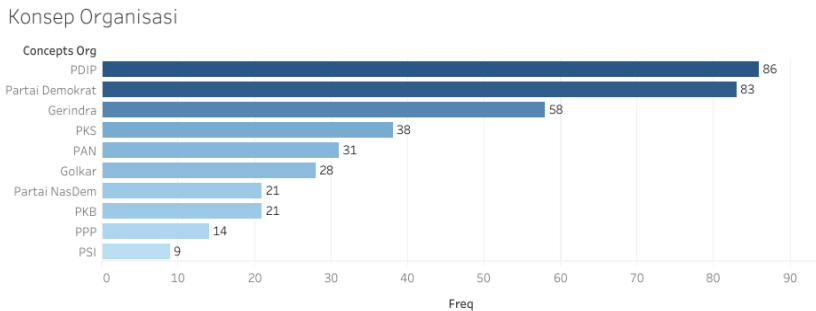
menjadi pembahasan dalam pemberitaan media *online* dengan total 362 berita. Keseluruhan hal yang tercantum didominasi oleh konsep-konsep kunci politik, kecuali “virus corona” sebagai konteks waktu kemunculan wacana. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan Robert Entman (1993) bahwa media akan menonjolkan beberapa aspek tertentu. Dalam konteks ini, konsep “presiden” sebagai suatu konsep politik yang paling berhubungan erat dengan kewacanaan “Jokowi Tiga Periode”.

Temuan penting lain dari sepuluh konsep teratas, konsep “virus corona” berada di atas beberapa konsep lain yang cukup krusial, seperti “pemilihan umum” dan “demokrasi”. Tulisan ini melihat hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, di antaranya wacana “Jokowi Tiga Periode” muncul dan berkembang di situasi pandemi. Selain itu, konteks pandemi Covid-19 dijadikan sebagai pertimbangan argumen, baik dari pihak pro maupun kontra terhadap isu ini. Pihak pro isu “Jokowi Tiga Periode” memiliki kecenderungan menilai situasi pandemi membutuhkan kestabilan dari sisi pemerintah sehingga diperlukan pemerintahan yang berfokus dalam penanganan pandemi. Di sisi lain,

pihak kontra menilai kegamangan yang terjadi dalam penanganan pandemi yang telah berjalan seharusnya tidak menjadi suatu justifikasi perubahan masa jabatan presiden dalam konteks negara demokrasi.

B. Organisasi Paling Banyak Dikaitkan

Grafik 2. Grafik Pemberitaan dan Kaitannya dengan Organisasi



Kaitan dengan organisasi menjadi aspek selanjutnya yang dikaji dari hasil analisis wacana “Jokowi Tiga Periode” di media *online*. Dari hasil 10 data teratas, kaitan organisasi diidentifikasi terfokus pada organisasi berbasis politik, yakni partai. Hal ini menunjukkan bahwa media mengaitkan kewacanaan “Jokowi Tiga Periode” dengan organisasi partai politik seperti sikap (*standing position*) maupun tanggapan dari pihak institusi yang disebut sebagai pilar demokrasi

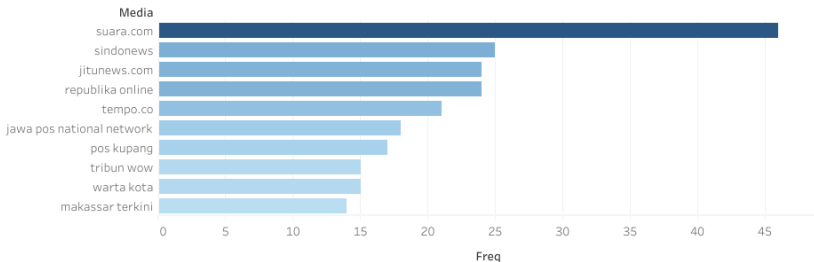
tersebut. PDIP, Partai Demokrat, dan Gerindra menjadi pihak yang cukup dominan dalam pemberitaan seputar wacana “Jokowi Tiga Periode”. Ketiganya menempati posisi tiga organisasi teratas dengan proporsi yang cukup berimbang.

Mengacu pada konsep variabel yang mempengaruhi kepatuhan kekuasaan terhadap pembatasan masa jabatan menurut Kristin McKie (2019), maka variabel institusi formal seperti partai politik memegang kunci bagaimana mekanisme pembatasan masa jabatan bekerja dalam kekuasaan. Upaya media dalam memperoleh informasi, baik berupa sikap maupun tanggapan terhadap kewacanaan perubahan masa jabatan atau dalam konteks ini, “Jokowi Tiga Periode”. Hal ini menjadi penting karena upaya perubahan batas masa jabatan bukanlah upaya tunggal kekuasaan tanpa peran dan kontribusi partai politik sebagai kendaraan setiap individu mencapai kekuasaan. Jika dikaitkan dalam konsep, kajian (Pan & Kosicki, 1993) yang melihat bahwa proses pengambilan keputusan berupa dorongan perubahan kebijakan yang bukan hanya dari elit, tidak ditemukan dalam temuan kajian ini. Data menunjukkan bahwa peran media berfokus pada menggerakkan pengambilan keputusan kebijakan berpusat pada level elit berupa tokoh-tokoh politik di level pemerintahan dan organisasi partai politik.

C. Media dengan Pemberitaan Terbanyak

Grafik 3. Media *Online* dengan Pemberitaan Terbanyak

<Media Online dengan Pemberitaan Terbanyak>



Aspek selanjutnya adalah terkait dengan media *online* dengan jumlah pemberitaan paling banyak selama periode Maret-Juni 2021. Hasil temuan kajian ini menunjukkan suara.com menjadi media *online* dengan pemberitaan terbanyak seputar isu “Jokowi Tiga Periode”. Menariknya, jumlah pemberitaannya hampir mencapai dua kali lipat dari media lainnya dengan pemberitaan pada isu yang sama. Selain itu, terdapat 2 dari 10 media *online* teratas adalah media lokal, yakni Pos Kupang dan Makassar Terkini. Meskipun demikian, pada dasarnya istilah media lokal maupun nasional sebenarnya menjadi bias, melihat baik media lokal maupun nasional

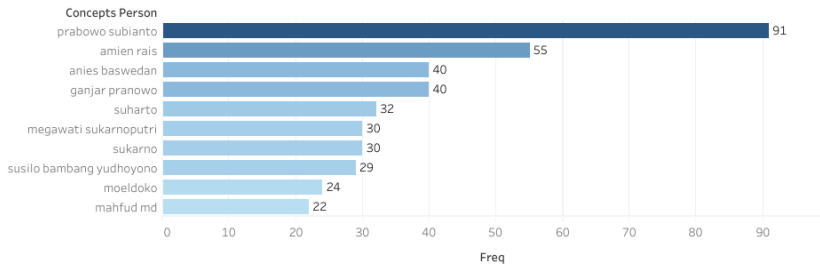
tidak memiliki perbedaan signifikan dari sisi keterjangkauan akses publik terhadap informasi. Pengelompokan hanya sebagai dasar pemetaan media dengan nama yang spesifik menunjukkan lokasi yang dijadikan sebagai nama media.

Banyaknya media yang melakukan pemberitaan seputar isu “Jokowi Tiga Periode” ini menunjukkan tingginya *exposure* terhadap wacana ini. Lebih dari itu, pemberitaan isu media, baik media pada level nasional maupun lokal menunjukkan adanya variasi dan jangkauan isu yang luas. Peran media bukan hanya sebagai pihak produksi informasi kepada publik. Lebih dari itu, media juga berperan dalam *framing* pemberitaan, yakni menentukan, menyeleksi, dan memilih informasi yang dapat disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya kepada publik. Perlu dijadikan catatan bahwa setiap media memiliki interpretasi dan cara mengemas informasi yang berbeda terhadap fenomena yang sama. Dengan demikian, setiap media memiliki kecenderungan pembingkaihan (*framing*) isu yang beragam dan memiliki karakteristik tersendiri dalam menjelaskannya kepada publik.

D. Tokoh dengan Pemberitaan Terbanyak

Grafik 4. Tokoh dengan Pemberitaan Terbanyak⁴

Konsep Tokoh



Aspek ini menunjukkan keterkaitan pemberitaan media *online* dengan tokoh atau figur publik tertentu. Hasil kajian ini menempatkan Joko Widodo sebagai tokoh dengan pemberitaan terbanyak. Hal ini menjadi relevan dan wajar melihat isu ini melibatkan langsung Joko Widodo sebagai tokoh sentral wacananya. Namun yang menjadi temuan kajian ini, nama-nama lain yang terlibat merupakan nama-nama yang diisukan berkontestasi pada pemilu 2024 (Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo). Selain itu, mantan presiden juga menjadi tokoh yang juga dikaitkan, seperti Megawati Soekarnoputri, Soeharto, Soekarno, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagian ini juga masih

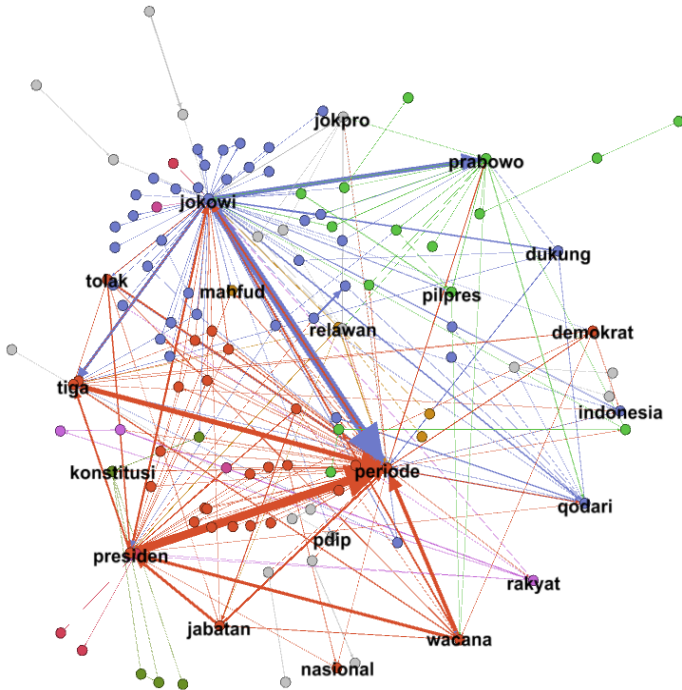
⁴ Bagian ini menghapus urutan tokoh teratas (*top person*) yakni Joko Widodo. Hal ini dilakukan sebagai upaya melihat keterkaitan aktor diluar tokoh kunci yang menjadi bagian dari wacana.

menunjukkan bahwa media menempatkan elit sebagai pusat dorongan perubahan kebijakan. Hal tersebut belum dapat membuktikan konsep *framing* media yang dikonstruksikan non elit yang dikemukakan Pan & Kosicki (1993).

Kecenderungan fokus isu pemberitaan yang mengarah pada Joko Widodo dengan perbedaan cukup jauh dengan tokoh-tokoh lain menunjukkan hal menarik. *Pertama*, *framing* yang dilakukan media memang tidak melebar pada tokoh di luar figur wacana itu sendiri, yakni Joko Widodo. *Kedua*, media yang menjadikan tokoh lain masuk ke dalam pemberitaan terbagi atas dua blok atau kelompok, yakni kandidat calon presiden 2024 dan juga mantan presiden Republik Indonesia sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya perluasan wacana atau perubahan figur utama dalam pemberitaan terhadap isu “Jokowi Tiga Periode”.

E. *Text Network Analysis (TNA)*

Gambar 1. Analisis Pemberitaan menggunakan *Text Network Analysis (TNA)*



Data di atas merupakan hasil dari *text network analysis* dalam pemberitaan isu “Jokowi Tiga Periode”. Gambar tersebut menunjukkan beberapa jaringan yang terbentuk dari pemberitaan media *online* yang menghasilkan keterkaitan

antar kata yang bersumber dari judul berita. Data tersebut merupakan gambaran dari perolehan analisis berupa terdapat empat kutub polarisasi besar yang ditunjukkan dengan adanya empat warna berbeda dalam grafik (biru, hijau, oranye, dan merah). Namun demikian, hasil visualisasi menunjukkan tingkat dominasi kluster berwarna biru dan merah. Terlihat juga bahwa terdapat persebaran titik (node) yang cukup banyak dan kompleks di dalam hasil analisis.

Tabel 1. Statistik *Text Network Analysis* (TNA)

<i>Attribute</i>	<i>Value</i>
<i>Nodes (total text)</i>	398
<i>Edges (connections)</i>	510
<i>Average degree (interactions)</i>	1.281
<i>Modularity (Heterogeneity/Cluster level)</i>	0.446

Jika dilihat secara statistik, *text network analysis* tersebut memperlihatkan sebanyak 398 kata yang dapat dihimpun dari judul berita. Jaringan antarkata yang terbentuk sebanyak 510 jaringan. Data juga menunjukkan bahwa jarak rata-rata antarkata yang membentuk jaringan sebesar 1.281 (satu koma dua delapan satu) yang diperoleh dari hasil bagi *edges* dan *nodes*. Terdapat polarisasi yang dapat dilihat melalui beberapa kutub besar. *Modularity* memperlihatkan skor 0.446 sebagai bagian dari tingkat keragaman komunitas yang

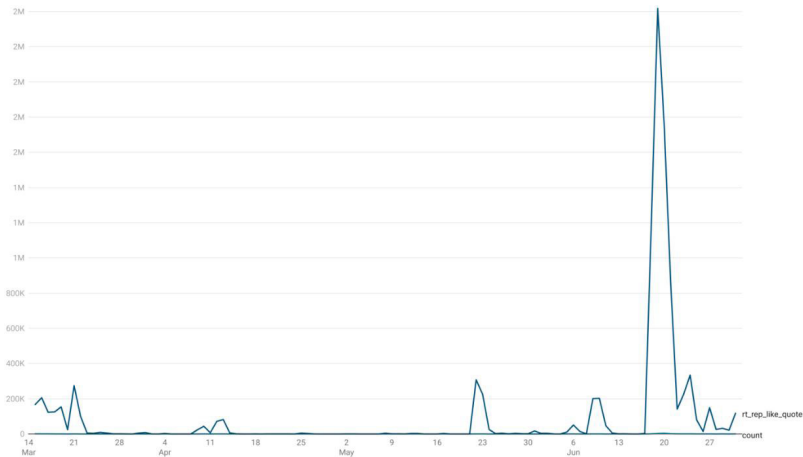
dibentuk dari jaringan antar-*nodes*. Skor tersebut bermakna terdapat empat kelompok yang terbentuk dari jaringan aktor yang direpresentasikan dengan empat warna berbeda pada gambar. Statistik tentang *text network analysis* lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

SENTIMENT ANALYSIS WACANA “JOKOWI TIGA PERIODE”: STUDI RESPONS NETIZEN MELALUI TWITTER

Perdebatan tentang wacana penambahan satu periode dalam masa kepemimpinan bagi Presiden Joko Widodo memuat berbagai respons. Polemik ini menjadi hal yang banyak dibahas lantaran menyangkut esensi dari demokrasi konstitusional, yaitu sirkulasi kekuasaan yang teratur. Problem ini kemudian mengerucut ketika wacana penambahan masa jabatan presiden tersebut untuk mengangkat nama Joko Widodo agar memperoleh masa jabatan yang ketiga. Hal ini yang kemudian memunculkan perbincangan dengan topik “Jokowi Tiga Periode”. Polarisasi tanggapan di ranah media sosial memiliki konstruksi sudut pandang yang kuat. Bagi kelompok yang menginisiasi usulan wacana tersebut dinilai tepat karena Jokowi diklaim memiliki *track record* programatik yang baik dan juga bertujuan untuk meminimalisir polarisasi politik di tahun 2024. Kerangka berpikir tersebut ditawarkan

oleh Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (JokPro) melalui deklarasi oleh Muhammad Qodari. Sementara itu, bagi masyarakat yang menolak, wacana “Jokowi Tiga Periode” merupakan tindakan inkonstitusional yang melanggar ketentuan dalam konstitusi karena presiden hanya memiliki dua periode jabatan (maksimal).

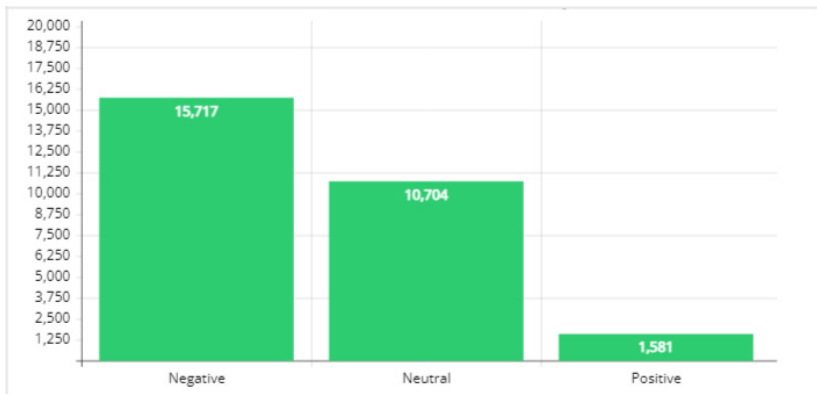
Grafik 5. Tren Tweet “Jokowi Tiga Periode”



Jika dilihat secara temporal, tren cuitan tentang “Jokowi Tiga Periode” terlihat sangat tinggi di tanggal 20 Juni 2021. Ini disebabkan sehari sebelum tanggal tersebut (19 Juni 2021) sejumlah relawan mendirikan Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas Jokpro) 2024 secara resmi di Jakarta. Menurut Baron Danardono selaku ketua seknas, deklarasi akan dilakukan apabila Jokpro telah berdiri di 34

provinsi atau kurang lebih 5 bulan setelah seknas diresmikan (Santoso, 2021). Tren ini dilihat dari *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote* yang cukup tinggi di pertengahan Maret 2021 dengan jumlah 200.000. Sementara itu, untuk tanggal 20 Juni 2021 sebagai titik tertinggi perbincangan “Jokowi Tiga Periode” memiliki jumlah 2.000.000 *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote*.

**Grafik 6. Sentimen pada Tweet “Jokowi Tiga Periode”
1 Maret - 30 Juni 2021**



Dalam proses pengambilan data *tweet* yang mengandung unsur “Jokowi Tiga Periode” atau “jokowi 3 periode” didapatkan 28.002 *tweet*, *reply*, dan *retweet*. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis sentimen dengan tiga tipe ekspresi konten, yaitu negatif, positif, dan netral. Hasil dari analisis sentimen *tweet* “Jokowi Tiga Periode” memperlihatkan mayoritas bersentimen

negatif (56%). Sementara itu sentimen netral menunjukkan hasil yang juga besar (38%) dan sangat sedikit *tweet* yang memiliki sentimen positif (6%). Persentase yang besar dalam *tweet* berkategori sentimen negatif menunjukkan wacana “Jokowi Tiga Periode” lebih banyak ditolak publik. Wacana ini dinilai bertentangan dengan arus utama *presidential term limits* dengan maksimal dua kali masa jabatan.

Besarnya sentimen negatif terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode” setidaknya juga dapat dijelaskan dengan beberapa *tweet* yang diunggah oleh warganet. Termasuk pada pola sentralisasi jaringan dengan *reply* dan *retweet* yang banyak terhadap *tweet* yang bersentimen negatif. Untuk itu tabel dibawah ini menangkap empat *tweet* teratas dengan jumlah *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote* paling banyak di antara *tweet* lain.

Tabel 2. Top Engaged Tweet Jokowi 3 Periode

<i>Username</i>	<i>Tweet</i>	<i>Retweet + Reply + Like + Quote</i>	<i>Sentiment</i>	<i>Score</i>
@mazzini_gsp	“Sampah masyarakat berkedok relawan, menjadikan “Jokowi Tiga Periode” itu gak sesuai sama konstitusi. Prabowo dijadikan wakil Jokowi kan harapannya biar gak ada pepecahan di rakyat kaya pemilu 2014 & 2019. Kalau caranya melanggar konstitusi, rakyat marah karena jijik. Relawan taek”	7.555	Negatif	99,841

@notaslimboy	<i>"Jokowi-Prabowo akan diusung untuk meloloskan Jokowi 3 periode. Jokowi sok-sokan nolak. Tapi kita tau, bapak ini gampang berubah pikiran dan omongannya gak bisa dipegang. Kalau Prabowo sih, asal alasannya demi Indonesia, dia pasti mau"</i>	5.490	Negatif	86,789
@dennysiregar7	<i>"Gagasan untuk sandingkan @jokowi dan @prabowo di 2024, bilanginya supaya tidak ada polarisasi di Pilpres nanti.. Catat. Beda pilihan Presiden itu wajar. Yang masalah bukan itu, tapi ada yang mainkan politik identitas. Itu yang harus dilawan. Saya menolak ide@ jokowi 3 periode!"</i>	5.107	Negatif	98.509
@akudennis	<i>"1997 jadi bayi2021 pengangguran2024 jokowi 3 periode"</i>	5.007	Neutral	98,204

Tabel tersebut menunjukkan empat *tweet* dengan interaksi terbanyak merupakan akun personal. Akun personal ini menunjukkan komentar atas isu "Jokowi Tiga Periode" dengan opini pribadi. Empat akun ini dipilih karena akumulasi *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote* lebih dari 5.000 dan memiliki gap dengan cuitan di bawahnya. Cuitan ini dapat merefleksikan perasaan atau tanggapan seseorang terhadap isu yang tengah berkembang. *Tweet top engaged* dalam kicauan "Jokowi Tiga Periode" tersebut memperlihatkan narasi negatif tentang isu ini. User *Twitter @mazzini_gsp* sebagai pemilik kicauan dengan interaksi tertinggi dengan cuitan:

“Sampah masyarakat berkedok relawan, menjadikan “Jokowi Tiga Periode” itu gak sesuai sama konstitusi. Prabowo dijadikan wakil Jokowi kan harapannya biar gak ada pepecahan di rakyat kaya pemilu 2014 & 2019. Kalau caranya melanggar konstitusi, rakyat marah karena jijik. Relawan taek”

Tweet ini melihat wacana “Jokowi Tiga Periode” dengan sentimen negatif dengan mengatakan relawan (Seknas Jokowi-Prabowo) yang mendeklarasikan diri mendukung “Jokowi Tiga Periode” sebagai sampah masyarakat. Begitu pun dengan ide “Jokowi Tiga Periode” dinilai negatif (rakyat marah karena jijik) karena melanggar konstitusi. Sebagaimana dalam konstitusi pasca amandemen, disebutkan bahwa masa jabatan satu periode presiden adalah selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali setelahnya. Konsekuensinya, ketika harus memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode harus diiringi dengan amandemen konstitusi. Problem konstitusional ini yang dinilai sebagai pelanggaran aturan main bernegara yang dilakukan oleh relawan Jokpro (Jokowi-Prabowo). Oleh program analisis sentimen, cuitan ini dinilai memiliki skor 99,841 untuk kategori negatif atau menunjukkan sentimen negatif yang kuat.

Problem konstitusional menjadi kata kunci yang paling banyak dibicarakan dalam nada negatif oleh warganet. Masalah tersebut menyangkut dengan batasan masa jabatan

presiden yang kemudian juga dibahas dengan konteks lain, seperti penolakan, reformasi, dan pengalaman rezim otoritarian. Setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang banyak digunakan untuk tweet bersentimen negatif, seperti pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kata Kunci sering Disebut dalam Sentimen Negatif

Kata Kunci	Frekuensi Digunakan (Tweet)	Makna
<i>Konstitusi</i>	5872	<i>Berhubungan dengan UUD 1945</i>
<i>Inkonstitusional</i>	2000	<i>Tidak sesuai dengan Konstitusi</i>
<i>Melanggar Konstitusi</i>	1527	<i>Tidak sesuai dengan Konstitusi</i>
<i>Tolak Jokowi</i>	1263	<i>Menolak gagasan “Jokowi Tiga Periode”</i>
<i>Pelanggar Konstitusi</i>	905	<i>Tidak sesuai dengan Konstitusi</i>
<i>Pengkhianat Reformasi</i>	654	<i>Mengingkari misi reformasi membatasi kekuasaan</i>
<i>Soekarno dan Soeharto</i>	122	<i>Menjabat tanpa batasan waktu, seperti Soekarno dan Soeharto</i>

Tabel tersebut menunjukkan “konstitusi” dengan turunan kata kunci “inkonstitusional”, “melanggar konstitusi”, “pelanggar konstitusi” memiliki frekuensi paling banyak. Temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi tentang konstitusi sebagai dasar dan pedoman bernegara harus dijaga. Berbagai

upaya yang bertentangan terhadap konstitusi dinilai sebagai bentuk pelanggaran sehingga “Jokowi Tiga Periode” lebih banyak didefinisikan sebagai bentuk gagasan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode juga dilihat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap misi reformasi yang ingin menegaskan batas-batas kekuasaan. *Term limit* dua periode merupakan kontrol untuk meminimalisir kembalinya *abuse of power* eksekutif negara sebagaimana terjadi pada masa Soekarno dan Soeharto dengan berbagai bentuk gurita kekuasaan seorang presiden.

Selain oleh @mazzini_gsp, cuitan bernada negatif ini dapat digambarkan dari akun @andiarief_ yang juga merupakan politisi Partai Demokrat:

“Wacana Jokowi 3 periode itu wacana inkonstitusional. Namun polisi gak perlu menangkap yang punya ide. Jika ada wacana inkonstitusional misalnya jabatan di periode kedua hanya cukup 2,5 tahun saja, artinya pemilu dipercepat juga jangan ditangkap. Demi keadilan.”

Lagi-lagi problem konstitusi yang disinggung oleh akun terkait, hal ini seakan menegaskan bahwa konstitusi merupakan harga mati yang harus dijaga. Sekaligus menutup pembicaraan tentang amandemen konstitusi

berdasar wacana mengurangi polarisasi politik 2024 dan mempertahankan kesuksesan pembangunan di bawah Presiden Joko Widodo. Tata politik sebagai produk konstitusi lebih ditonjolkan pada perbincangan “Jokowi Tiga Periode” dalam sentimen negatif.

Sementara itu, sentimen positif terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode” tidak mendapatkan simpati publik. Hanya 6% (1581 *tweet*) yang memiliki tendensi mendukung upaya pencalonan kembali Joko Widodo bersama Prabowo Subianto untuk menggambarkan cuitan positif tentang isu “Jokowi Tiga Periode” dapat dilihat dari cuitan @mariobalote di bawah ini:

“@budimandjatmiko @fadjroel @tvOneNews @jokowi setuju Jokowi 3 periode... negara jadi makmur... gemah ripah loh jinawi... baldatun thoyibatun wa robbun ghofur...”

Akun tersebut menyatakan persetujuan dengan kata “setuju”, “Jokowi Tiga Periode” dengan alasan akan membawa kemakmuran bagi negara. Selain itu “kemakmuran” diungkapkan pula menggunakan dua bahasa berbeda. *Gemah ripah loh jinawi* sebagai ungkapan dalam bahasa Jawa dan *baldatun thoyibatun wa robbun ghofur* dalam bahasa Arab

yang berarti negeri yang makmur dan tentram. *Tweet* lain yang memiliki sentimen positif terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode” adalah @bastianmalau1 yang memiliki skor 95.479 dan @guechoky dengan cuitan berikut:

“Saya sependapat dgn pak qadari ini karena menurut blm ada saya lihat calon se ikhlas dan jujur seperti pak jokowi .Andaikan bisa diamandemen UUD saya sangat...sangat...mendukung. Pak jokowi 3 periode.”- @bastianmalau1

“Pokoknya gw dukung banget Jokowi 3 periode atau bahkan seumur hidup. Masalah amandemen gampang lah itu. Yg namanya aturan bisa diatur...”- @guechoky

Beberapa akun tersebut menunjukkan bagaimana konstitusi merupakan produk politik dan memungkinkan untuk diubah dengan kepentingan “Jokowi Tiga Periode”. Wacana “Jokowi Tiga Periode” tersebut dikemas dengan alasan kinerja Presiden Jokowi yang diklaim memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan memiliki jiwa yang ikhlas dalam bekerja. Upaya ini senada dengan yang diungkapkan Versteeg *et.al.* (2020) beberapa strategi inkonstitusional untuk mengintervensi pembatasan masa jabatan, antara lain penyesuaian dan perubahan konstitusi, penggunaan pengadilan untuk meninjau kembali konstitusi, penunjukan penerus kekuasaan dan penundaan pemilu.

Sedangkan untuk *tweet* dengan sentimen netral sebagai kategori yang menempati posisi kedua setelah cuitan positif dapat dilihat sebagai *tweet* yang memiliki diksi pernyataan langsung maupun tidak langsung dan oleh sistem dibaca sebagai cuitan yang tidak bernilai negatif maupun positif. Contoh dari tipe ini dapat dilihat dalam *tweet* @YanHarahap di bawah ini yang memiliki skor netral 99.528.

*“Soal Jokowi 3 Periode, Yan Harahap: Jika Dibiarkan,
Bisa Muncul Wacana ‘Turunkan Presiden Sekarang’”*

Secara keseluruhan dari dataset sebanyak 28.002 oleh sistem IndoNLU yang dibuat oleh (Wilie *et.al.*, 2020) diperoleh skor 91.473 untuk sentimen analisis ini. Skor ini merupakan nilai akhir dari analisis kekuatan sentimen dalam keseluruhan data *tweet* yang telah dikumpulkan. Hasil ini juga mengungkapkan bahwa tidak seluruh data mutlak bernilai positif, negatif, maupun netral. Potensi data *tweet* tidak dibaca sebagaimana mestinya dapat terjadi sebagai bagian dari data yang dilatih oleh *machine learning*. Program dari *machine learning* tidak sepenuhnya (100%) akurat, tetapi memiliki beberapa bias yang mungkin terjadi. Ini terjadi akibat program sebenarnya merupakan sebuah alat yang dilatih dengan kebiasaan menganalisis teks tertentu sehingga memiliki kemampuan membaca makna dari sebuah teks bernilai negatif, positif, ataupun netral dengan kebiasaannya.

Gambar tersebut menunjukkan beberapa jaringan membentuk kumpulan perbincangan pada aktor-aktor kunci. Beberapa aktor dengan *predikat top influencer* (dilihat dari *retweet, reply, like, dan quote*) dalam wacana “Jokowi Tiga Periode”, seperti @dennysiregar7 (11,837) dan @mazzini_gsp (7.942) membentuk jaringan perbincangan sendiri dengan identifikasi cuitan sebagai sentimen negatif pada tabel 1. Sementara itu, @panca66 (8.967) dan @putrawadapi (8.867) memiliki pusat sendiri dengan membentuk pemusatan yang bersifat kompleks antara netral, positif, dan negatif.

Tabel 4. Statistik *Social Network Analysis*

<i>Attribute</i>	<i>Value</i>
<i>Nodes (accounts)</i>	12.265
<i>Edges (connections)</i>	23.075
<i>Average degree (interactions)</i>	1.881
<i>Modularity (Heterogenity/Cluster level)</i>	0.601

Topik “Jokowi Tiga Periode” setelah dianalisis menggunakan *social network analysis* memperlihatkan 12.265 akun yang terkoneksi dan terdiri dari akun asli dan bot. Puluhan ribu akun tersebut dihubungkan oleh 23.075 jaringan yang berbeda. Data akun *nodes* dan *edges* dapat diterjemahkan terdapat 2 interaksi

(pembulatan dari 1.8) dari satu akun terhadap akun lainnya. Temuan ini memperlihatkan hanya sedikit akun yang memiliki multi interaksi. Sementara itu, klaster pembicaraan dengan nilai 0.601 menunjukkan terdapat polarisasi yang cukup terlihat. Nilai ini semakin mendekati angka 1 akan menunjukkan klaster yang lebih terpolarisasi.

REFERENSI

- Chu, S. C. (2011). Viral Advertising in Social Media: Participation in Facebook Groups. *Journal of Interactive Advertising* 12 (1), 30–43.
- D’Angelo, P. (2002). *News Framming as a Multiparadigmatic Research Program: a Response to Entman*, *Journal of Communication*, 870–888.
- Dearing, J. (1998). Maxwell McCombs, Donald L. Shaw, and David Weaver, eds., *Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*. *Public Opinion Quarterly*, 125–128.
- Delvira. (2021). Penggagas Komunitas Jok-Pro 2024 M. Qodari Dukung “Jokowi Tiga Periode”. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/penggagas-komunitas-jok-pro-2024-m-qodari-dukung-jokowi-tiga-periode.html>.
- Entman, R. M. (1993). Framming: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43 (4), 51–58.
- Entman, R. M. (2004). *Projections of Power: Framming News, Public Opinion, and US Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press.

- Esfandari, D. & M. Alqosam (2020). Pemberitaan Aksi Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Analysis Framming Robert N. Entman di *MediaIndonesia.com* Periode September 2018-Januari 2019. *Jurnal Interaksi*. Vol 4 (1), 12–23.
- Exoo, C. F. (2010). *The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century*. Los Angeles: SAGE Publications. doi:<http://dx.doi.org/10.4135/9781452230351>.
- Foundation, Kofi Annan. (2016). Changing term limits: an electoral perspective. *Electoral Integrity Initiative*, pp. 4–14.
- Ginsburg, T., Z. Elkins, & J. Melton. (2011). On the Evasion of Executive Term Limits. *52 William & Mary Law Review*, 1807–1872.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harvard University Press.
- Habibi, M. (2019). Framming Kompas.com dan Republika.co.id atas Pernyataan Ahok tentang Dibohongi Al-Maidah 51. *Kajian Ilmu Sosial*. Vol 30 (1), 67–84.
- Hendra, W.B. Darmawan, F. Manan, & L.H. Husin. (2020). Limiting Presidential Term of Office In Indonesia: A Democratic Perspective. *Jurnal Wacana Politik*, 136–148.
- Hertog, J., & D. McLeod (2001). *A Multiperspectival Approach to Framming Analysis: A Field Guide*.

- Kinsey, D. & S. Popkin. (1991). The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns. *Political Psychology*, 596.
- Kompas. (2021). Sejumlah Pihak Merespons Negatif Deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo 2024. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/article/185114/sejumlah-pihak-merespon-negatif-deklarasi-seknas-jokowi-prabowo-2024>.
- Koto, F., A. Rahimi, J. Lau, & T. Baldwin. (2020). *IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP*. <http://Arxis.Org/Abs/2011.00677>.
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia* 43 (4), 636–657.
- Maltz, G. (2007). The Case for Presidential Limits. *Journal of Democracy* 18 (1), 128–142.
- Mckie, K. (2019). Presidential Term Limit Contravention: Abolish, Extend, Fail or Respect? *Comparative Political Studies*, 1500–1534.
- Pan, Z. & G. Kosicki. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. Political Communication. *Political Communication*, 55–75.
- Patta, A. K. (2009). Masalah dan Prospek Demokrasi. *Jurnal Academica*. Vol 1, 35–44.

- Santoso, B. (2021). Seknas Jokowi-Prabowo 2024 Resmi Berdiri, Deklarasi Digelar 5 Bulan Lagi. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2021/06/20/063002/seknas-jokowi-prabowo-2024-resmi-berdiri-deklarasi-digelar-5-bulan-lagi>.
- Sujoko, A. (2019). Komunikasi Politik Gerakan #2019GantiPresiden. *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 9 (1), 36–57. doi:<https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.36-57>.
- Tull, D. M. & C. Simons. (2017). The Institutionalisation of Power Revisited: Presidential Term Limits in Africa. *Africa Spectrum*, Vol. 52, No. 2, 79–102.
- Versteeg, M., *et.al.* (2020). The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion. *Columbia Law Review* 120 (1), 173–248.
- Wicks, R. (1992). Schema Theory and Measurement in Mass Communication Research: Theoretical and Methodological Issues in News Information Processing. *Annals of the International Communication Association*, 115–145.
- Wilie, B., *et.al.* (2020). *IndoNLU: Benchmark and Resoruces for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding*. [Http://arxiv.org/abs/2009.05387](http://arxiv.org/abs/2009.05387).